

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 25, No. 3, Tahun 2020

ISSN 0853-9316

- ASPEK POLITIK PEMERINTAHAN
DARI RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI
oleh: Prayudi
- URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN
DI ERA EKONOMI DIGITAL
oleh: Trias Palupi Kurnianingrum
- PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA
oleh: Luthwi Febryka Nola
- MERGER BANK SYARIAH BADAN USAHA MILIK NEGARA: QUO VADIS?
oleh: Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati
- WORKPLACE WELL-BEING DAN PSYCHOLOGICAL CAPITAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
oleh: Sulis Winurini



**Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI**

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 25, No. 3, Tahun 2020

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● ASPEK POLITIK PEMERINTAHAN DARI RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI oleh: Prayudi	177-195
● URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL oleh: Trias Palupi Kurnianingrum	197-216
● PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA oleh: Luthwi Febryka Nola	217-229
● MERGER BANK SYARIAH BADAN USAHA MILIK NEGARA: QUO VADIS? oleh: Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati	231-250
● WORKPLACE WELL-BEING DAN PSYCHOLOGICAL CAPITAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA oleh: Sulis Winurini	251-268

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 25. No. 3 Tahun 2020. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan dari penulis internal Pusat Penelitian. Tulisan pertama berjudul “Aspek Politik Pemerintahan dari Rencana Pemindahan Ibukota Negara RI”, yang ditulis oleh Prayudi. Gagasan untuk memindahkan Ibukota semakin kuat ditegaskan dan telah menunjuk Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan peta perencanaan langkah untuk realisasi pemindahan Ibukota Negara. Meskipun ditahun 2020, pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amien sudah mengambil keputusan untuk menunda realisasi gagasan pemindahan Ibukota Negara sebagai akibat terpaan bencana global pandemi Covid 19, tetapi rencana IKN masih dipandang penting sebagai basis pengembangan kewilayahan Indonesia dimasa depan. Terdapat aspek politik pemerintahan yang strategis terkait rencana pemindahan IKN yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan satu sama lain guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapainya. Aspek politik pemerintahan rencana IKN memiliki muatan substansi yang saling terkait tadi yaitu: pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, sebagai simbol identitas nasional, dan peta politik kepartaian.

Artikel kedua adalah tentang “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital”, yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Dengan masuknya era digital yang dipadukan dengan fenomena dan potensi big data maka data pribadi telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga. Meskipun memiliki nilai ekonomis tinggi sayangnya pelindungan data pribadi konsumen masih belum maksimal. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen yang meresahkan masyarakat. Penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen di antaranya minimnya negara dalam memberikan pelindungan, minimnya pengetahuan konsumen, dan sebagainya. Pada dasarnya materi pelindungan data pribadi telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, hanya saja cakupan pelindungannya belum maksimal. Adanya beberapa aturan menyebabkan tumpang tindih mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan data pribadi itu sendiri sehingga yang paling dirugikan adalah pihak konsumen. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi konsumen.

Tulisan ketiga membahas isu ketenagakerjaan dengan judul “Penerapan *Omnibus Law* Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, yang ditulis oleh Luthvi Febryka Nola. Artikel ini menyatakan bahwa terlalu banyak aturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan adanya ketidaksinkronan antar aturan, menjadi salah satu faktor penyebab investasi di Indonesia berjalan stagnan. Demi meningkatkan investasi, Pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan termasuk aturan ketenagakerjaan dengan menggunakan teknik *omnibus law*. Penggunaan teknik ini menimbulkan pro dan kontra para ahli hukum terkait legitimasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Sesungguhnya *omnibus law* telah diterapkan dalam pembuatan beberapa UU. Di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hasil penyederhanaan dari enam ordinansi dan sembilan undang-undang.

Tulisan keempat ditulis oleh Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati dengan judul “*Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis?*”. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tingkat penetrasi aset syariah tergolong rendah yaitu dibawah 8 persen. Hal ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif melakukan merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Melalui merger ini diharapkan kapasitas modal, skala

pembiayaan dan *market share* dapat meningkat, sehingga Indonesia dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah. Langkah merger tersebut juga harus dilengkapi dengan fitur kebijakan afirmatif lainnya sehingga industri perbankan syariah dapat tumbuh pesat. Diantaranya mendorong integrasi ekosistem bisnis syariah dalam kawasan ekonomi halal, kemudahan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, penguatan sinergi dengan sektor Zakat Infaq Sadaqah Waqaf, mendorong transaksi keuangan pemerintah melalui perbankan syariah, menghindari pengurangan pegawai dalam proses merger, serta menyusun detail tahapan operasional merger.

Tulisan yang terakhir berjudul “*Workplace Well-Being dan Psychological Capital Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta*”, yang ditulis oleh Sulis Winurini. *Psychological capital* menjadi konsep yang penting diangkat, begitupun halnya dengan *workplace well-being*. Kedua konsep tersebut diyakini memiliki hubungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *workplace well-being* dan *psychological capital*, dengan nilai korelasi yaitu $r = 0.36, p < 0.01$. Diperoleh hasil R^2 sebesar 0,126, artinya 12,6 % varians *psychological capital* dapat dijelaskan oleh *workplace well-being*. Sementara terhadap masing-masing komponen *psychological capital*, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *workplace well-being* dan komponen *harapan*, dengan nilai korelasi yaitu $r = 0.46, p < 0.01$. Sementara pada komponen *efikasi diri*, *resiliensi*, dan *optimistis*, tidak ada hubungan yang signifikan dengan *workplace well-being*.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol 25, No. 3 Tahun 2020. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.Si, Prof. Dr. Lili Romli, M. Si, Prof. Dr. Achmad Suryana dan Dr. Juneman Abraham, S.Psi, M.Si, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Desember 2020

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

ASPEK POLITIK PEMERINTAHAN DARI RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, hlm. 177-195

Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) memiliki catatan sejarah yang panjang bagi Republik Indonesia, bahkan baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan RI tahun 1945. Pemerintahan Jokowi setelah Pemilu 2019 lalu menunjukkan, gagasan untuk memindahkan Ibukota semakin kuat ditegaskan dan telah menunjuk Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan peta perencanaan langkah untuk realisasi pemindahan Ibukota Negara. Meskipun ditahun 2020, pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amien sudah mengambil keputusan untuk menunda realisasi gagasan pemindahan Ibukota Negara sebagai akibat terpaan bencana global pandemi Covid 19, tetapi rencana IKN masih dipandang penting sebagai basis pengembangan kewilayahan Indonesia di masa depan. Terdapat aspek politik pemerintahan yang strategis terkait rencana pemindahan IKN yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan satu sama lain guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapainya. Aspek politik pemerintahan rencana IKN memiliki muatan substansi yang saling terkait tadi yaitu: pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, sebagai simbol identitas nasional, dan peta politik kepartaian. Tulisan ini dengan menggunakan konsep tentang pemerintahan wirausaha dan kapasitas politik memerintah menemukan indikasi bahwa rencana IKN perlu diwujudkan dalam kerangka yang jelas di setiap tahapannya. Point mendasar dari kerangka tadi adalah mengenai keperluan periode transisi dari pemindahan Ibukota di Jakarta ketika dipindahkan di areal IKN kawasan Kaltim. Di sini membutuhkan semacam kepemimpinan politik yang kuat sekalipun level *City Manager* dalam Badan Otorita IKN. Kebutuhan kepemimpinan bagi Badan Otorita demikian mengingat tugas-tugas dan kewenangan mengelola IKN akan berhadapan tidak saja dengan soal-soal teknis pengelolaan kota, tetapi juga akan berhadapan dengan kepentingan politik organisasi politik kepartaian dan para pebisnis yang memiliki jaringan kuat.

Kata kunci: ibukota negara; aspek politik pemerintahan; pusat pemerintahan; Kalimantan Timur; rencana pemindahan ibukota negara.

URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, hlm. 197-216

Dengan masuknya era digital yang dipadukan dengan fenomena dan potensi *big data* maka data pribadi telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat pengembangan ekonomi digital terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki nilai ekonomis tinggi sayangnya perlindungan data pribadi konsumen masih belum maksimal. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen yang meresahkan masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif, membahas faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan data pribadi konsumen di era digital serta peran negara dalam perlindungan hukum data pribadi konsumen. Analisa permasalahan menggunakan teori kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen di antaranya minimnya negara dalam memberikan perlindungan, minimnya pengetahuan konsumen, dan sebagainya. Pada dasarnya materi perlindungan data pribadi telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, hanya saja cakupan pelindungannya belum maksimal. Adanya beberapa aturan menyebabkan tumpang tindih mekanisme dan kewenangan dalam melakukan perlindungan data pribadi itu sendiri sehingga yang paling dirugikan adalah pihak konsumen. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu, peran negara untuk melindungi data pribadi konsumen dapat dilakukan dengan cara segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, membentuk lembaga khusus, dan pengaturan sanksi yang tegas dan mengikat.

Kata kunci: era digital; data pribadi konsumen; perlindungan hukum; RUU Pelindungan Data Pribadi.

Luthvi Febryka Nola (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, hlm. 217-229

Banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan adanya ketidaksinkronan antar aturan menjadi salah satu faktor penyebab investasi di Indonesia berjalan stagnan. Demi meningkatkan investasi, Pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan termasuk aturan ketenagakerjaan dengan menggunakan teknik *omnibus law*. *Omnibus law* merupakan proses penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik ini menimbulkan pro dan kontra para ahli hukum terkait legitimasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan *omnibus law* dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan bahwa *omnibus law* telah diterapkan dalam pembuatan beberapa UU. Di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hasil penyederhanaan dari enam ordinansi dan sembilan undang-undang. Hanya saja memang proses pembentukan UU No. 13 tahun 2003 tidak mudah karena harus mengakomodir banyak kepentingan, memakan waktu lama dan biaya besar. Sedangkan yang terbaru, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses pembahasannya di DPR memang tidak memakan waktu lama hanya saja telah lama dipersiapkan oleh Pemerintah dan saat diundangkan langsung menghadapi banyak *judicial review*.

Kata kunci: *omnibus law*; ketenagakerjaan; UU Cipta Kerja.

Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

MERGER BANK SYARIAH BADAN USAHA MILIK NEGARA: QUO VADIS?

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, hlm. 231-250

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tingkat penetrasi aset syariah tergolong rendah yaitu dibawah 8 persen. Sementara Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei, dan Saudi Arabia, rata-rata di atas 20 persen. Potensi pasar yang besar, belum dapat mengantar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Hal ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif melakukan *merger* antara Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Melalui *merger* ini diharapkan kapasitas modal, skala pembiayaan dan market share dapat meningkat, sehingga Indonesia dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah. Namun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *merger* tidak selalu menjadikan kinerja perbankan efisien bahkan menunjukkan kegagalan. Lalu sejauh mana, tujuan *merger* bank syariah BUMN ini dapat tercapai? Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT dengan menggunakan data primer (wawancara dan *focus group discussion* dengan *stakeholder* terkait) serta data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa langkah *merger* tersebut harus dilengkapi dengan fitur kebijakan afirmatif lainnya sehingga industri perbankan syariah dapat tumbuh pesat. Diantaranya mendorong integrasi ekosistem bisnis syariah dalam kawasan ekonomi halal, kemudahan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, penguatan sinergi dengan sektor Zakat Infaq Sadaqah Waqaf, mendorong transaksi keuangan pemerintah melalui perbankan syariah, menghindari pengurangan pegawai dalam proses *merger*, serta menyusun detail tahapan operasional *merger*. Intervensi pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada *merger*, harus ada upaya lebih pemerintah dalam memperbesar pangsa pasar perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan *market share* perbankan syariah di pasar industri perbankan nasional maupun global.

Kata kunci: bank syariah BUMN; *merger*; analisis SWOT.

WORKPLACE WELL-BEING DAN PSYCHOLOGICAL CAPITAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, hlm. 251-268

Reformasi birokrasi membawa tantangan dalam kehidupan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus pemerintah dalam hal ini adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia di organisasi Pemerintahan Kota Yogyakarta. *Psychological capital* menjadi konsep yang penting diangkat, begitupun halnya dengan *workplace well-being*. Kedua konsep tersebut diyakini memiliki hubungan. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara *workplace well-being* dan *psychological capital* pada PNS di Pemerintah Kota Yogyakarta? Penelitian dilakukan terhadap 90 PNS yang berada di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *workplace well-being* dan *psychological capital*, dengan nilai korelasi yaitu $r = 0.36$, $p < 0.01$. Diperoleh hasil R^2 sebesar 0,126, artinya 12,6 % *varians psychological capital* dapat dijelaskan oleh *workplace well-being*. Sementara terhadap masing-masing komponen *psychological capital*, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *workplace well-being* dan komponen harapan, dengan nilai korelasi yaitu $r = 0.46$, $p < 0.01$. Sementara pada komponen efikasi diri, resiliensi, dan optimistis, tidak ada hubungan yang signifikan dengan *workplace well-being*.

Kata kunci: reformasi birokrasi; *workplace well-being*; *psychological capital*; PNS; Yogyakarta.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

A POLITICAL GOVERNANCE ASPECTS OF THE TRANSFER OF STATE CAPITAL PLAN

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, p. 177-195

The planning of state capital move or IKN's has long history notes for the Republic of Indonesia, even before or after 1945. The Jokowi administration's after the last elections of 2019, showed ideas to move capital stronger confirm and has appointed the State Ministry of Development Planning as an institution that coordinates the map of planning steps to realize state capital transfers. Although in years of the 2020s, the Jokowi-Ma'ruf Amien government has already made decisions to postpone the transfer of capital an idea realizations as an impact of global disaster the pandemic of Covid 19 exposure, the plan of capital transfers still considered important as the basis to develop further Indonesia's region in the future. There is an aspect of governance that is strategically related to the state capital transfer plan. It cannot be separated each one another for success to achieve their goals. The governance aspect of the IKN's contain substances where related earlier: the separation center of Government and business, as a symbol of national identity, and political parties map. By using the concept of entrepreneurial governments and governability, these articles indicate that capital transfers need to manifest in the clear frameworks in their every stage. The fundamental point from that framework is about the necessity of transition periods move from Jakarta city capital to the region of the IKN area of East Kalimantan. Here need a kind of strong leadership, though, as a level of City Managers in the Authority Body of IKN's. The needs of such leadership for the Authority Body thereby are their task assignment and authority will face off not only with the technical matters city management but also with the political organizations of parties and business communities who are strong linkages ownership.

Keywords: *the state capital; the political governance aspects; center of governance; East Kalimantan; the plan of state capital transfers.*

Trias Palupi Kurnianingrum (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE URGENCY OF PROTECTION CONSUMER'S DATA IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, p. 197-216

In the digital era, combined with big data's phenomena and potential, personal's data has become a valuable commodity. This condition is not without reason. They consider that the digital economy's development has been proven to drive economic growth even though it has high economic value, the consumer's data protection still not optimal. Many cases issue consumer's data unsettling society. This article, produced from a normative judicial approach, discusses the cause and impacts of issues consumer data in the digital economic era and the state's role in providing legal protection. Analysis of the problem uses the theory of legal certainty and legal protection. This research indicates the causes of misuse of consumer data caused by the lack of the state in providing protection, the lack of consumer knowledge, and others. Personal data protection material has already been regulated in several laws and regulations, but the protection is not optimal. The number of regulations causes overlapping mechanisms and authorities to protect personal data itself, making consumers disadvantaged. Therefore, there should be special rules governing the protection of consumer data. The state's role to protect consumer personal data can be carried out by approving the draft of personal data protection law, forming particular institutions, and setting strict and binding penalties.

Keywords: *the digital era; consumer's personal data; legal protection; the draft bill of personal data protection.*

Luthvi Febryka Nola (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE IMPLEMENTATION OF OMNIBUS LAW IN INDONESIAN LABOR LAW

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, p. 217-229

Many laws and regulations that regulate labor issues and the inconsistency between regulations are some of the factors causing investment in Indonesia to stagnate. To increase investment, the Government and the DPR formed Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation by simplifying several laws and regulations, including labor regulations, by using the omnibus law technique. Omnibus law is a process of simplifying laws and regulations. This technique raises the pros and cons of legal experts regarding its legitimacy in the legal system in Indonesia. This paper will discuss the application of the omnibus law in labor law in Indonesia. The discussion finds that the omnibus law has been applied in the making of several laws. In the human resources, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower results from a simplification of six ordinances and nine laws. It is just that forming Law no. 13 of 2003 is not easy because it has to accommodate many interests, takes a long time, and is expensive. Most recently, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the deliberation process at the DPR does not take long. It is just that the Government has long prepared it, and when it is promulgated, it immediately faces many judicial reviews.

Keywords: omnibus law; employment; job creation law.

Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

STATE OWN ENTREPRISE SHARIAH BANK MERGER: QUO VADIS?

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, p. 231-250

As a country with the largest Muslim population globally, Sharia assets' penetration rate is still low, below 8 percent. Meanwhile, Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei, and Saudi Arabia have an average of over 20 percent. The enormous market potential has not yet been able to make Indonesia the center of sharia economy and finance in the world. This potential market prompted the Government through the Ministry of BUMN to take the initiative to merge between Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, and BNI Syariah. The merger is expected that capital capacity, the scale of financing, and market share can increase. That way, Indonesia can enter the global market and become a catalyst for the Islamic economy's growth. However, several previous studies have shown that mergers do not always make banking performance efficient; some show failures and therefore needed to be liquidated. Then to what extent, the objectives of the merger can be achieved? This paper uses a qualitative descriptive approach and SWOT analysis using primary data (interviews and focus group discussions with relevant stakeholders) and secondary data. This research finds that this merger step must complement other affirmative policy features to overgrow the Islamic banking industry. The example of affirmative policy are: encouraging the integration of the sharia business ecosystem in the halal economic area; easy access to capital for MSMEs; strengthening synergy with the Zakat Infaq Shadaqah Waqf sectors; encourage government financial transactions through Islamic banking; avoid reducing employees in the merger process; and compiling detailed operational stages of the merger. The Government intervention should not stop at the merger. More government efforts must expand Sharia banking's market share to increase Sharia banking's market share in the national and global banking markets.

Keywords: BUMN sharia bank; merger; SWOT analysis.

WORKPLACE WELL-BEING AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF CIVIL STATE EMPLOYEES IN GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY

Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, p. 251-268

Bureaucratic reform brings challenges in the working life of Civil Servants. The Government's focus, in this case, is the development of human resource capacity in the government organizations of Yogyakarta City. Psychological capital is an important concept to raise, as well as workplace well-being. The two concepts are correlated. The question to be answered in this research is, is there a correlation between workplace well-being and psychological capital among civil servants in the Government of Yogyakarta City? The study conducted on 90 civil servants in the Government of the Special Region of Yogyakarta using quantitative methods. The results showed a positive and significant correlation between workplace well-being and psychological capital, with a correlation value of $r = 0.36$, $p < 0.01$. The R^2 results were 0.126, meaning that 12.6% of the psychological capital variance was explained by workplace well-being. Meanwhile, for each component of psychological capital, it was found that there was a positive and significant correlation between workplace well-being and components of expectations, with a correlation value of $r = 0.46$, $p < 0.01$. Meanwhile, there was no significant correlation with workplace well-being on the components of self-efficacy, resilience, and optimism.

Keywords: *bureaucratic reform; workplace well-being; psychological capital; civil servants; Yogyakarta.*